

**PERGANTIAN KEPALA NEGARA
MENURUT PEMIKIRAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH DAN
SYI'AH
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI MODERN DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
dalam Ilmu Syariah**

**Oleh :
RIAN DANI ANJARSARI
NPM : 1621020438**

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasa Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

**PERGANTIAN KEPALA NEGARA MENURUT PEMIKIRAN AHLUS
SUNNAH WAL JAMA'AH DAN SYI'AH DALAM PERSPEKTIF
DEMOKRASI MODERN DI INDONESIA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)**

dalam Ilmu Syariah

Oleh :

RIAN DANI ANJARSARI

NPM : 1621020438

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021M**

ABSTRAK


Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sistem politik dalam Islam dipegang oleh para sahabat Nabi. Dikalangan umat Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang siapakah yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Hal ini terjadi karena al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sendiri tidak ada yang secara tegas menjelaskan bagaimana sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang harus dilaksanakan umat Islam setelah beliau, sehingga menimbulkan berbagai perbedaan penafsiran dan pendapat yang pada akhirnya melahirkan berbagai aliran politik Islam seperti, Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sistem pemerintahan Islam dipegang oleh sahabat Nabi. Di dalam negara Indonesia memiliki sistem pengangkatan kepala negara yaitu dengan cara pemilu yang memakai sistem demokrasi modern. Permasalahan dalam skripsi ini ialah, Bagaimana konsep pergantian kepala negara menurut pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah dalam mekanisme pergantian kepala negara? Bagaimana pandangan demokrasi modern terhadap konsep Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah tentang pergantian kepala Negara? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang dua aliran tersebut yang dikaitkan dengan demokrasi saat ini. Dalam memperoleh data, metode yang digunakan yaitu: jenis penelitian kepustakaan atau (*Library Research*). Sifat penelitian *Content Analysis*, adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Sumber data yaitu sumber bahan primer dan bahan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber buku yang ada seperti, literatur ilmu politik Islam, dan fiqh siyasah serta tulisan-tulisan yang lain termasuk media internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pergantian kepala negara menurut kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Syi'ah dalam perspektif demokrasi modern dan untuk mengetahui pemikiran mana yang sesuai dengan demokrasi modern. Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah tentang pergantian kepala negara wajib dilaksanakan karena menyangkut kemaslahatan semua umat. Sedangkan Syi'ah pergantian kepala negara wajib, tetapi yang berhak menjadi kepala negara adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (*ahlul al bait*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa antara pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Syi'ah yang sesuai dengan prinsip demokrasi adalah pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ditandai dengan adanya lembaga Syura untuk memutuskan suatu masalah. Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa yang sesuai dengan demokrasi modern adalah pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah karena dalam pemikiran ini mengenal sistem syura dalam memutuskan suatu kebijakan dan ada sedikit kesamaan dengan prinsip demokrasi yaitu keadilan bagi seluruh umat dan mengenal lembaga (*ahlul hall wa al aqd*), dan rakyat melalui perwakilannya. Sedangkan menurut syiah yang berhak memimpin suatu negara pada masa itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Dan di dalam demokrasi Indonesia menggunakan sistem presidensial dalam pemerintahan. Dengan begitu presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat dengan cara pemilihan umum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rian Dani Anjarsari
NPM : 1621020438
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Syi'ah dalam Perspektif Demokrasi Modern di Indonesia” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, Desember 2020
Penulis,

Rian Dani Anjarsari
1621020438



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letnol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.(0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi: "Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlus Sunnah
Wal Jama'ah dan Syi'ah dalam Perspektif Demokrasi Modern di
Indonesia"**

Nama : Rian Dani Anjarsari

Npm : 1621020438

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP.197009011997031002**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.Ag
NIP. 197408162003122004**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah**

**Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letnol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp.(0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah dan Syi’ah dalam Perspektif Demokrasi Modern di Indonesia**” disusun oleh, **Rian Dani Anjarsari**, NPM : 1621020438, program studi **Hukum Tata Negara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Senin, 28 Desember 2020**. Waktu : **11:00-13:00 WIB**. Ruang Sidang di **GSG Lantai 1**.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, S.H.I., M.H.I

Penguji I : Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.

Penguji II : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



MOTTO

سنن أبي داود ٢٥٣٩: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Sunan Abu Daud 2539: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, dari Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata:

"Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang yang menangani urusan umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya."

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Yang terhormat dan sangat saya sayangi kedua orang tua tercinta, ayahanda Sudarno dan ibunda Misriani, yang selalu berjuang membesarkan dan membimbingku untuk keberhasilan baik bersifat moril maupun materil.
2. Untuk kedua kakakku, Ari Setiono dan Anita Mina Sari, yang senantiasa memberikan motivasi dan inspirasi kepada saya, agar selalu bersemangat dalam segala hal terutama dalam rangka penyelesaian studi.
3. Untuk keponakanku Novia Puspita Sari, Anggun Perwita Sari dan Vito Leon Saputra yang menjadi penyemangat saya.
4. Untuk anak KKN terkhusus Eva, Ipeh, Fani, dan Anisa yang telah memotivasi penulis.
5. Untuk geng jajan (Ayu Deliana, Dewi, Septika, Nora, Fitri, Dila, Titan. Icha), Mbak Rifa dan Anggraike, Wiwin Ayu Lestari, Noviana Lestari, Nezzi Amerta Saputri, Endang Sri Yunita, Marlena dan Indah Anugerah Saraswati yang telah menjadi penyemangat sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
6. Untuk rekan-rekan HTN kelas I yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
7. Untuk Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menjadi tempat penulis ditempa menjadi seorang mampu berfikir untuk lebih maju.



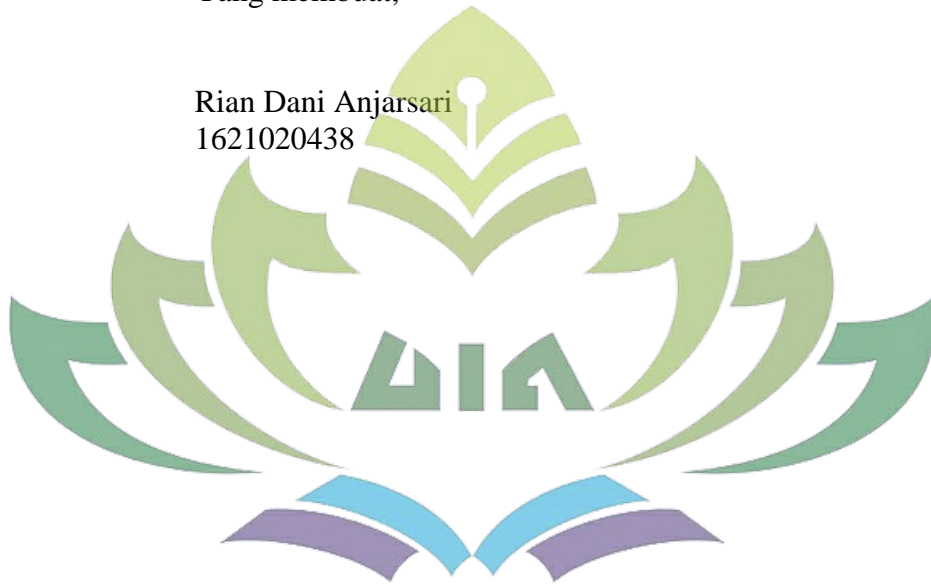
RIWAYAT HIDUP

Nama Rian Dani Anjarsari, dilahirkan di Gedung Boga pada tanggal 08 September 1998, anak ketiga dari pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Misriani. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar 02 Gedung Boga dan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Way Serdang selesai tahun 2013, Sekolah Menengah Akhir Negeri (SMAN) 02 Way Serdang selesai 2016 dan mengikuti pendidikan perguruan tinggi pada fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 2016/2017.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Desember 2020
Yang membuat,

Rian Dani Anjarsari
1621020438



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama’ah Dan Syi’ah Dalam Perspektif Demokrasi Modern”. Adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang telah diberikan oleh semua pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih seluruhnya kepada:

1. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja’far, S.Ag., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah khususnya Program Studi Siyasah Syar’iyyah atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
9. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dan saran bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka dan ucapan terima kasih. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terkhusus bagi penulis, Aamiin.

Bandar Lampung, Desember 2020
Penulis,

Rian Dani Anjarsari
1621020438

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	16
E. Rumusan Masalah	17
F. Tujuan Penelitian	17
G. Signifikansi Penelitian	17
H. Metode Penelitian	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Demokrasi	21
1. Pengertian Demokrasi	21
2. Prinsip-prinsip Dasar Ajaran Demokrasi	22
B. Pergantian Kepala Negara dalam Sistem Demokrasi	25
1. Pengertian Demokrasi	25
2. Sistem Pemilihan Kepala Negara dalam Demokrasi	30
3. Tujuan Demokrasi	35
4. Pergantian Kepala Negara dalam Demokrasi	36
C. Demokrasi di Indonesia	42

BAB III PEMIKIRAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH DAN SYT'AH TENTANG PERGANTIAN KEPALA NEGARA

A. Pergantian Kepala Negara Menurut Ahlus Sunnah Wal Jama'ah	63
1. Pengertian Aliran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Karakteristik	63
2. Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah tentang Pergantian Kepala Negara	69
3. Contoh-contoh Pergantian Kepala Negara	73

B. Pergantian Kepala Negara Menurut Syi'ah	74
1. Pengertian Aliran Syi'ah dan Karakteristik.....	74
2. Pemikiran Syi'ah tentang Pergantian Kepala Negara.....	79
3. Contoh-contoh pergantian Kepala Negara	87
C. Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Syi'ah tentang Pergantian Kepala Negara.....	88

BAB IV ANALISIS

A. Pandangan Demokrasi Terhadap Pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan Syi'ah tentang Pergantian Kepala Negara	91
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	95
---------------------	----

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **“Pergantian Kepala Negara Menurut Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Syi’ah dalam Perspektif Demokrasi Modern di Indonesia”** untuk menghindari kesalahpahaman, maka peneliti akan menegaskan beberapa istilah, sebagai berikut, yaitu:

Pergantian adalah suatu keadaan berubah atau berganti di mana biasanya berkaitan dengan suatu jabatan atau pangkat seseorang.¹

Kepala negara adalah orang yang mengepalai atau memimpin suatu negara atau kerajaan.²

Ahlu sunnah Wal Jama’ah dan syi’ah, istilah Ahlus Sunnah wal Jama’ah berasal dari kata *ahl* (*ahlun*), berarti golongan atau “pengikut” *al-sunnah* berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencakup tindakan, ucapan, dan ketetapan Rasulullah. Secara etimologis, “Ahlus Sunnah Wal Jama’ah” berarti golongan yang senantiasa mengikuti jalan Rasulullah SAW dan hidup sahabatnya.³

Syi’ah berasal dari bahasa Arab, شيعية *Syi’ah* dari kata *Syi’atu ‘Ali* “pengikut Ali” adalah salah satu sekte pecahan dari Islam. Adapun menurut terminologi Islam kata Syi’ah, bermakna mereka yang menyatakan bahwa

¹Pettra Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 1999) h 211.

²Pettra Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press, 1999) h 159.

³Sahilun A. Nasir, *Pemikiran Kalam Teologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), h 187.

Ali bin Abi Thalib adalah yang paling utama di antara para sahabat dan yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan atas kaum Muslimin demikian pula anak cucunya.⁴

Demokrasi, adalah sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang meliputi tiga hal mendasar, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵ Dan dalam mencapai suatu keputusan membuat suatu kebijakan harus berdasarkan musyawarah secara bersama-sama. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Modern, adalah biasanya merujuk pada sesuatu yang terkini, baru dan sebagainya.⁶ Sedangkan demokrasi modern itu sendiri adalah

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perubahan atau pergantian untuk memimpin suatu negara atau kerajaan yang merujuk pada pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah, dan dalam demokrasi modern bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan secara musyawarah dan bersama-sama.

⁴Sahilun Nasir, *Pemikiran Kalam (teologi Islam) Ajaran, Sejarah, dan Perkembangan*, h 72.

⁵A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015), h 82.

⁶Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, 2014), h 78.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul “Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Syiah dalam Perspektif Demokrasi Modern di Indonesia” adalah sebagai berikut :

1. Secara objektif, mekanisme pergantian kepala negara sangatlah wajib dalam bernegara karena hal tersebut dapat menunjang kemajuan bangsa dan negara, suatu negara harus ada yang memimpin sesuai dengan judul yang diteliti yaitu Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Syi’ah.
2. Secara subjektif,
 - a. Pokok bahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni yaitu Siyasah.
 - b. Literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan menunjang sebagai referensi kajian dalam usaha menyelesaikan skripsi.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah negara pergantian kepala negara sangatlah penting dan bahkan sangat berpengaruh kepada kemajuan dan berkembangnya sebuah negara. Hiruk-pikuk masalah yang ada di sebuah negara adalah suatu pergantian pemimpin.

Islam sebagai risalah terakhir dan syari’at yang sempurna, tidak mungkin dapat terwujud tanpa disertai dengan tegaknya prinsip-prinsip atau dasar-dasar negara yang akan mewujudkan tujuan ajaran Islam melalui pelaksanaan undang-undang dikalangan umat manusia. Allah berfirman :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ

لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat(QS:An-Nisa: 105)

Pemerintahan dan kepemimpinan, bagi suatu umat (masyarakat) sangat penting karena merupakan fitrah dan tuntutan kehidupan social umat manusia. Hal ini, telah dipahami oleh Rasulullah Saw. bahkan membatasi pentingnya kepemimpinan pada komunitas yang besar saja tetapi juga dalam komunitas yang kecil.

Di dalam ketatanegaraan Islam, ada juga pergantian (suksesi). Dalam hal ini muncul persoalan yang sangat luar biasa yaitu ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632M/10 H adalah suksesi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya kelak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu.” (Qur’an Surah. An-Nisa: 59).

Ada dua pendapat, tentang ulil amri dalam ayat di atas. Ada yang mengatakan mereka adalah para ulama, ada juga yang mengatakan mereka adalah para umara’ (pemimpin). Imam Ath-Tbhobary merojihkan bahwa ulil amri dalam ayat di atas adalah para pemimpin. Sedangkan imam Ibnu Katsier mengatakan, “Nampaknya –wallahu A’lam- ayat ini memaksudkan para

umara' sekaligus para ulama'. Ayat ini tegas memerintahkan umat Islam untuk mentaati apa yang diperintah oleh ulil amri (pemimpin). Ayat ini menghendaki adanya suatu ulil amri (pemimpin) dalam kehidupan. Ayat ini melalui *isyarah al nash* memerintahkan adanya sosok pemimpin atau kepala negara. *Kedua*, terhadap hukum fiqh yang berkenaan dengan persoalan kemasyarakatan, campur tangan pemerintah mutlak dibutuhkan, demi menghindarkan perselisihan ketidakpastian hukum. Di samping itu tentunya agar dapat terwujudnya keseragaman amaliah umat dan terciptanya kemaslahatan umat.⁷

Beliau juga, tidak memberi petunjuk tentang tata cara pengangkatan penggantinya (khalifah). Ketiadaan petunjuk ini, menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sehingga, hampir membawa perpecahan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Bahkan, jenazah beliau sendiri “terlantar” oleh pembicaraan seputar khilafah ini.⁸

Sehari setelah Rasul wafat, kaum Anshar memprakarsai musyawarah besar di Tsaqifah Bani Sa'idah. Setelah wafat umat Islam mengalami goncangan.

Dalam perdebatan yang alot, antara kaum Muhajirin dan Anshar akhirnya, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Namun, pengangkatan Abu Bakar bukannya tanpa oposisi. Keluarga Nabi terutama putri beliau Fathimah, menyesalkan pengambilan keputusan yang terburu-buru tersebut sebelum

⁷Lihat pengantar Mushthafa al-Saqa (editor) dalam al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, Tanpa Tahun), hlm. 3-5

⁸Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group).2016. h 73

pemakaman Nabi dan tidak mengikutsertakan *ahl al-bayt* seperti ‘Ali bin Abi Thalib dan ‘Usman bin Affan . sebagian kecil sahabat Nabi seperti Zubeir ‘Awwam, Salman al-Farisi, dan Abu Dzar al- Ghiffari yang simpati kepada Ali tidak setuju dengan cara-cara musyawarah dan pemilihan khalifah Abu Bakar.⁹

Dalam sebuah negara, pergantian kepala negara sangatlah penting dan bahkan sangat berpengaruh kepada kemajuan, dan berkembangnya sebuah negara. Hiruk-pikuk masalah, yang ada di sebuah negara adalah suatu pergantian pemimpin.

Di dalam ketatanegaraan Islam, ada juga pergantian (suksesi). Dalam hal ini, muncul persoalan yang sangat luar biasa yaitu, ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632M/10 H adalah suksesi. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya kelak. Beliau juga tidak memberi petunjuk tentang tata cara pengangkatan penggantinya (khalifah). Ketiadaan petunjuk ini menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Sehingga hampir membawa perpecahan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Bahkan, jenazah beliau sendiri “terlantar” oleh pembicaraan seputar khilafah ini.¹⁰

Dalam perjalanan pulang setelah Haji Wada‘, Nabi dan rombongan umat Islam berhenti di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khumm dan

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group).2016. hal 119.

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* h 120-122.

menyampaikan wasiat. Isi wasiat tersebut adalah tentang penunjukan ‘Ali sebagai pengganti beliau kelak. Dalam hadis ini juga diceritakan bahwa setelah penunjukan tersebut ‘Umar menemui Ali dan mengucapkan selamat untuknya. “Mulai hari ini dan seterusnya, kata ‘Umar, engkau menjadi pemimpin kaum beriman, laki-laki dan perempuan.” Pemikiran ini cikal bakal lahirnya Syi’ah di belakang hari dalam politik Islam.¹¹

Konflik Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan Syi’ah, terjadi sejak awal abad sejarah peradaban Islam. Bermula dari perbedaan dalam aspirasi politik, kemudian berkembang memasuki ranah teologi dan keagamaan. Hingga kini pun gesekan-gesekan senantiasa mewarnai dinamika hubungan keduanya, dari gesekan halus hingga keras dan berdarah-darah. Sejak awal mula Syi’ah muncul dari aspirasi politik sekelompok orang yang mengklaim hak kepemimpinan umat Islam pasca Rasulullah Saw.¹²

Ali adalah sepupu, menantu, sahabat, dan salah satu orang yang berislam di awal periode kenabian (*al-sabiqun al-awwalun*). Ahlus Sunnah wal Jama’ah, sebutan pendek Ahli sunah wa jamaah, adalah nama sebuah aliran pemikiran yang mengklaim dirinya sebagai pengikut sunah, yaitu sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya.¹³ Dalam ketatanegaraan suatu suksesi kepemimpinan sangatlah penting dan menggantikan pemimpin yang lalu agar tercipta suatu

¹¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group).2016. h 131.

¹²Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa al-Tirmidzi, Jami’ Tirmidzi, *Kutubun al-Sittah, 2641* (April 2000/Muharrrom, 1421), h 1918

¹³Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa al-Tirmidzi, Jami’ Tirmidzi, *2641* , h 1918.

kemaslahatan umat Islam.¹⁴ Namun oleh beberapa pemikir Ahlus Sunnah wal Jama'ah, konsep khalifah (kepala negara) sebagai *Khadim al-Ummah* (pelayan umat) diubah menjadi *Zhill Allah* (bayang-bayang Allah) yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Pemikiran ini tentu saja tidak terlepas dari kepentingan politik para penguasa untuk mempertahankan supremasinya terhadap rakyat.¹⁵ Ciri lain pemikiran politik golongan Ahlus Sunnah wal Jama'ah adalah penekanan mereka terhadap suku Quraisy sebagai syarat kepala negara.

Pandangan mereka dilandasi pada Hadis Nabi SAW, yang menyatakan bahwa imam-imam (pemimpin) umat Islam harus berasal dari suku Quraisy (*al-A'imma min Quraisy*). Al-Ghazali, al-Juwaini, al-Baqillani, dan al-Mawardi menyatakan syarat ini dengan tegas, sedangkan Ibn Abi Rabi' tidak menyinggungunya sama sekali masalah suku Quraisy ini. Namun ini bukan berarti bahwa Ibn Abi Rabi' membenarkan suku selain Quraisy untuk memegang jabatan sebagai kepala negara.¹⁶

Begitu kuatnya pengaruh kekuasaan suku Quraisy ketika itu, sehingga tidak terbayangkan jabatan tertinggi tersebut akan jatuh ke tangan selain suku Quraisy. Bahkan Muhammad Rasyid Ridha, yang hidup pada abad modern, masih menekankan supremasi suku Quraisy ini dalam pemikiran politiknya.¹⁷ Berbeda dengan pandangan para tokoh Ahlus Sunnah wal Jama'ah di atas, Ibn Khaldun berpendapat bahwa syarat Quraisy tersebut bukanlah "harga

¹⁴Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Jakarta: Prenada Media Group).2016. h 121.

¹⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h 126.

¹⁶*Ibid.*, h 127.

¹⁷*Ibid.*, h 128.

mati” yang harus dilaksanakan dalam setiap masa. Menurutnya, Nabi menjelaskan persyaratan suku Quraisy untuk menjadi kepala negara adalah karena pada saat itu suku Quraisy memiliki wibawa dan kekuatan di segani di Jazirah Arab. Suku Quraisy mempunyai ‘*ashabiyah*’ atau solidaritas kelompok yang kuat saat itu. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu dan perubahan situasi dan kondisi, tidak tertutup bagi suku-suku yang lain yang mempunyai ‘*ashabiyah*’ yang kuat sebagaimana terdapat dalam tradisi Quraisy. Karenanya, suku lain pun bisa menjadi kepala negara, asalkan mereka mampu. Satu hal yang penting dicatat tentang teori pemikir politik Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah luputnya pembahasan Syura (musyawarah) dari kamus politik mereka.¹⁸

Pada masa Bani Abbas, pada umumnya pemikir politik Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam sistem pemerintahan. Oleh karenanya teori politik mereka tidak lepas dari realitas politik yang mereka hadapi. Tidak mengherankan kalau mereka berusaha memberi legitimasi dan mempertahankan pemerintahan yang berkuasa.¹⁹

Adalah logis jika konsep kepatuhan mutlak harus diberikan rakyat kepada penguasa dan syarat keharusan suku Quraisy untuk menjabat kepala negara mengaburkan visi pemikir-pemikir Ahlus Sunnah wal Jama’ah terhadap konsep syura yang intinya mengikutsertakan masyarakat dalam mengontrol jalannya roda pemerintahan. Konsep syura pun menjadi semakin jauh dari teori politik Ahlus Sunnah wal Jama’ah dengan berkembangnya

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* h 128.

¹⁹ *Ibid.*, h 128.

doktrin Khalifah sebagai bayangan Allah sehingga tidak dapat diturunkan dari jabatannya.²⁰

Jika pemikiran politik Ahlus Sunnah wal Jama'ah berpendapat seperti diatas, berbeda lagi dengan pemikiran politik Syi'ah. Syi'ah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW telah mendominasi percaturan politik Islam. Mereka menganggap bahwa yang berhak memegang kekuasaan politik setelah Nabi wafat adalah 'Ali ibn Abi Thalib, suami Fathimah binti Rasulullah, dan keturunannya sebagaimana dalam Hadis Ghadir Khumm di atas.²¹ Di samping Hadis tersebut, kelompok Syi'ah juga mengemukakan sebuah hadis lain untuk menguatkan adanya wasiat Nabi tentang kekhalifaha 'Ali.²²

Meski secara bahasa Syi'ah itu bermakna "pengikut", namun al-Syahrastani mengkhususkan istilah Syi'ah kepada kelompok pengikut Ali bin Abi Thalib yang mengklaim bahwa Ali lah yang secara nash dan wasiat dari Nabi Saw berhak atas imamah dan khilafah. Mereka pun meyakini bahwa imamah itu tidak akan keluar dari garis keturunan Ali bin Ali Thalib.²³

Kata imam dan imamah berasal dari kata "*amma-yaummu-amman-imaman-imaamatan*" yang berarti memimpin, pemimpin atau kepemimpinan.²⁴ Kata "imam" sendiri sering merujuk pada subyek pemilik

²⁰*Ibid.*, h 129.

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h 131.

²²*Ibid.*, h 133.

²³Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal Juz I* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1993), h 169.

²⁴Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1967), h 16-17.

kekuasaan. Biasanya, di bidang ritual keagamaan sedangkan kata *imamah* lebih ditekankan pada jabatan, posisi atau fungsi memimpin.²⁵

Secara terminologis al-Hilli, seperti yang dikutip Zainal Abidin, mendefinisikan *imamah* sebagai “Kepemimpinan umum dalam segenap urusan religius dan sekuler (non-relegius) yang diemban oleh seseorang yang mewakili atau menggantikan posisi Nabi Saw”.²⁶ Atas dasar ini Abidin memahami bahwa dalam konsep *imamah* terkandung makna posisi utama seorang imam yang setara dengan Nabi Saw dengan satu titik perbedaan; Nabi Saw menerima wahyu, sementara imam tidak demikian.²⁷ Meski, penentuan seorang imam merupakan wilayah otoritas Allah Swt, namun ternyata kalangan Syi’i sendiri berbeda-beda dalam mengidentifikasi imam-nya sehingga terbagi-bagi dalam beberapa kelompok. Al-Syahrastani membagi kelompok-kelompok dalam Syi’ah ada lima: Kaisaniyah, Zaidiyyah, Imamiyah, Ghulat, dan Ismailiyah.²⁸

Dalam perjalanan pulang setelah Haji Wada’, Nabi dan rombongan umat Islam berhenti di sebuah tempat yang bernama Ghadir Khumm dan menyampaikan wasiat. Isi wasiat tersebut adalah tentang penunjukan ‘Ali sebagai pengganti beliau kelak. Dalam hadis ini juga diceritakan bahwa setelah penunjukan tersebut ‘Umar menemui Ali dan mengucapkan selamat untuknya. “Mulai hari ini dan seterusnya, kata ‘Umar, engkau menjadi

²⁵Lihat Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Service, 1976), h 26.

²⁶Zainal Abidin, *Imamah dan Implikasi dalam Kehidupan Sosial: Telaah atas Pemikiran Teologi Syiah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012), h 77.

²⁷*Ibid.*, h 77-78.

²⁸*Ibid.*, h 78.

pemimpin kaum beriman, laki-laki dan perempuan.” Pemikiran ini cikal bakal lahirnya Syi’ah di belakang hari dalam politik Islam.²⁹

Mereka beralasan pada Hadis “Ghadir Khumm”. Hadis Gadir Khum tidak hanya terdapat dalam kitab hadis kalangan Syiah, namun juga termuat dalam kitab kalangan Ahlus Sunnah wal Jama’ah . Hadis Khadir Khum memiliki sanad yang sangat banyak. Menurut catatan Salamah Noorhidayati, riwayat tersebut termaktub dalam banyak kitab hadis, seperti dalam Sunan al-Tirmidzi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan al-kubra karya Imam al-Nasai, serta Sahih bin Hibban.³⁰

Lebih jauh dijelaskan, dalam Sunan al-Tirmidzi, Sahih bin Hibban dan Sunan Ibn Majah terdapat sebuah riwayat mengenai Ghadir Khum, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal ada sekitar sepuluh hadits, dan ada cukup banyak di dalam Sunan al-Kubra-nya Imam al-Nasai.³¹

Selain itu, hadis tersebut juga memiliki jalur periwayatan yang sangat banyak. Disebutkan, jalur yang sangat banyak itu meliputi disemua tingkatan, baik pada tingkat sahabat maupun perawi yang lainnya dan masing-masing telah memenuhi syarat *syahid* dan *mutabi*.³²

Berikut ini contoh hadits Ghadir Khum yang termuat dalam Sunan Ibn Majah:³³

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ قَالَ : أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ : أ

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*. (Jakarta: Prenada Media Group).2016. h 131.

³⁰ Salamah Noorhidayati, “*Hadis Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni dan Syi’ah*”, *Laporan Penelitian IAIN Tulungagung*, 2014, h 39-40.

³¹ Salamah Noorhidayati, “*Hadis Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni dan Syi’ah*”, h 40-47.

³² *Ibid*, h 82.

³³ Salamah Noorhidayati, “*Hadis Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni dan Syi’ah*”, h 45.

قَبْلَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي حَجَّ، فَنَزَلَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ، فَأَمْرًا صَلَاةً جَامِعَةً، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: ((أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَّا أَنْفُسِهِمْ؟)) (قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ:)) أَلَسْتُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ مُؤْمِنٍ نَفْسِهِ؟ ((قَالُوا: بَلَىٰ، قَالَ:)) فَهَذَا أَوْلَىٰ مَنْ أُنَامُوا لَهُ، اللَّهُمَّ وَالَاهُ، اللَّهُمَّ عَادِمَنْ عَادَاهُ.

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Husayn, telah mengabarkan kepadaku Hammad bin Salamah. Dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Adi bin Tsabit, dari Bara' bin Azib berkata: Kami kembali bersama Rasulullah Saw dari berhaji, maka beliau berhenti ditengah jalan lalu memerintahkan untuk shalat berjama'ah, maka (setelah shalat) beliau memegang tangan Ali lalu berkata: 'Bukankah aku lebih tinggi (awla) dari diri orang-orang mukmin?.' Mereka menjawab: 'Benar'. Rasul pun berkata “ Maka (orang) ini (Ali bin Abi Thalib) merupakan wali bagi orang yang menjadikan aku sebagai mawla-nya. Ya Allah tolonglah (walin) orang yang berwali kepadanya, ya Allah musuhilah orang yang memusuhinya.

Selain hadits di atas, kelompok Syi'ah juga mengklaim kepemimpinan Ali bin Abi Thalib pada hadits menceritakan keadaan Nabi Saw yang sedang sakit parah beberapa hari menjelang wafat.³⁴

Berdasarkan persoalan di atas sangat beda sekali tentang mekanisme (pergantian) kepala negara antara Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah. Kisah Al-Ghadir bagi Syi'ah Ja'fariyah dianggap sebagai landasan pertama tentang imamah.³⁵

Setelah orde baru berakhir pada 1998, suasana tersebut berubah total setelah gerakan reformasi muncul dan mengakhiri masa orde baru. Dalam berbagai tantangan Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda menggembirakan bagi

³⁴ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *fath al-Bari VIII* (Temp:Maktabah Salafiyah, tt), h 132.

³⁵ Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syi'ah Studi perbandingan Akidah dan Tafsir jil I* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h 134.

masa depan dan kualitas demokrasi.³⁶ Sistem politik dengan pemilu yang semakin terbuka dengan kontestan banyak partai politik dan pembatasan jabatan kepala Negara menjadi indikator demokrasi Indonesia yang penting. Keterbukaan politik, kebebasan pers dan berserikat serta berkumpul dan kebebasan beragama yang semakin semarak di era reformasi semakin menambah kualitas demokrasi Indonesia.

Asumsi umum mengatakan bahwa demokrasi di tingkat lokal akan mendapatkan kekuatan apabila terjadi penyerahan mandate (politik) langsung dari rakyat kepada kepala Negara dengan cara pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu pelaksanaan asas-asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi yang memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika Negara.³⁷ Dalam sistem demokrasi kekuasaan berada di tangan rakyat. Sementara, sistem politik merupakan proses interaksi kelompok rakyat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, Dahl menambahkan, untuk mencapai tujuan-tujuan dalam sebuah sistem politik demokratis membutuhkan berbagai lembaga yang akan memegang peran penting di dalamnya, seperti (1) para politisi yang dipilih melalui suara voting; (2) pemilu yang bebas, adil, dan berkala; (3) kebebasan berpendapat; (4) sumber informasi alternatif (tidak dimonopoli oleh pemerintah); (5) kebebasan berserikat (kebebasan berkumpul dan mendirikan organisasi); (6) hak kewarganegaraan yang

³⁶A, Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, h 27.

³⁷Khairuddin, M. Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara Pasca Amendemen Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), h 73.

inklusif (mencakup semuanya).³⁸ Demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk mewujudkan *performed* (eksis dan tegak). Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi.³⁹

Masalah yang sama Ibnu Khaldun menyatakan: “ Pengangkatan imam (pemimpin) adalah wajib, kewajiban tersebut berdasarkan ijma’ para sahabat dan tabi’in⁴⁰. Karena ketika Rasulullah Saw. wafat. Para sahabat beliau segera membaiai Abu Bakar (r.a) dan menyerahkan segala urusan kepadanya. Demikian pula setelah pada setiap zaman setelahnya, umat Islam tidak pernah dibiarkan dalam ketidakaturan pada suatu masa. Hal ini menjadi ijma’ yang menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin.

Indonesia pasca reformasi memiliki beberapa peraturan terkait dengan kepemimpinan salah satu dari peraturan tersebut adalah Undang-undang tentang pemilihan umum Presiden dan Wapres yaitu Undang-undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 dan kemudian mengalami perubahan ke undang-undang berikutnya yang disempurnakan yaitu Undang-undang Pemilu No. 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Pada tahap awal pembentukan Negara Kesatuan Republik

³⁸ Tb. Massa Djafar, *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi(Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi)*, (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2015), h 36.

³⁹ Dede Rosyada, et. al. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h 112-113.

Indonesia dengan berlandaskan pada teori *daruriyyat*, para elit politik muslim bersepakat untuk mengangkat Soekarno-Hatta menjadi kepala Negara dan wakil.⁴¹ Ditinjau dari teori politik kenegaraan, model pengangkatan kepala Negara dan wakil identik dengan teori aklamasi. Hal ini karena secara yuridis, pada waktu itu belum ada konstitusi yang menjadi payung hukum sebagai instrument-regulatif. Secara historis, terjadinya perubahan dasar konstitusi tersebut seiring dengan dinamika politik yang mengirinya. Pada era Orde Baru Lama (1945-1965), konsep pengangkatan kepala Negara secara normative sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa kepala Negara, diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara hal itu, dalam hal ini DPR-GR, mekanisme tersebut mengilustrasikan adanya teori perwakilan-representasi dari rakyat melalui lembaga parlemen. Teori ini secara konseptual dapat diidentikkan dengan teori *Ahl al-Hall wa al-Aqd*.⁴² Demikian halnya pada Era Orde Baru, mekanisme pengangkatan kepala Negara senantiasa mengacu pada konstitusi/UUD 1945 yang telah disepakati sebagai dasar Negara yang baku. Bahkan, konstitusi ini nyaris disakralkan oleh sebagian elit politik yang menginginkan kelanggengan teori “*status quo*”.

Cara pengangkatan kepala Negara di Indonesia baik sebagai perdana menteri, maupun sebagai presiden dilakukan dalam bentuk pemilihan

⁴¹Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 236.

⁴²Mujar Ibn Sarif, Hamami Zada, *Fiqh Siyasat Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 124.

melalui perwakilan rakyat (DPR), dan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.⁴³

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian penelitian itu lebih fokus kepada pergantian kepala negara menurut pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah dalam perspektif demokrasi modern.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara pemikir Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah dalam mekanisme pergantian kepala negara ?
2. Bagaimana pandangan sistem demokrasi terhadap pandangan Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah tentang pergantian kepala negara ?

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui konsep pergantian kepala negara menurut pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah dalam perspektif demokrasi modern.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan demokrasi di era modern terhadap konsep Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah.

⁴³Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 237.

G. Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi di Fakultas Syariah, dan diharapkannya sumbangsih pemikiran yang positif, serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap hidup dan berkembangnya ilmu, khususnya tentang pergantian kepala negara.
- b. Kegunaan praktis, penelitian memberikan pengetahuan kepada masyarakat terutama tentang pergantian kepala negara menurut pemikiran Ahlus Sunnah wal Jama'ah dan Syi'ah dalam perspektif demokrasi modern di Indonesia serta dapat memenuhi syarat akademik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur dan menelaah dari berbagai macam teori dan pendapat yang mempunyai hubungan relevan dengan permasalahan yang di teliti.⁴⁴

b. Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian content analitis. Adapun *Content Analitis* adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam

⁴⁴Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

media massa. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik/metode penelitian, yang kemudian diperoleh kesimpulan..⁴⁵ Menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.

2. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan sumber data tersebut yaitu : sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

a. Sumber Bahan Primer

Sumber yang diperoleh secara langsung yang berasal dari Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ahli yang sesuai dengan yang akan diteliti.

b. Sumber Bahan Sekunder

Sumber bahan sekunder adalah : “Sekumpulan data yang akan menopang data primer yang berkaitan dengan obyek penelitian”. Sumber data ini merupakan buku-buku yang berkaitan judul penelitian. Bahan sekunder diperoleh dari referensi buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Rajawali Pers, 1985), h.15.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan dilakukan melalui sumber-sumber literatur yang tersedia diperpustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Metode Pengelolaan Data

Setelah sumber (*literature*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber diatas, maka langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut di kumpul.
- b. Penandaan (*coding*) yaitu memberikan catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, atau buku-buku literature yang relevan dengan penelitian.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁴⁶

5. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparatif. Analisis komparatif adalah upaya yang dilakukan

⁴⁶ *Ibid*, h 107.

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. DEMOKRASI

1. Pengertian dan Prinsip-prinsip Ajaran Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah suatu istilah yang bersifat universal. Namun tidak ada satu sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa atau semua Negara. Istilah boleh sama, tetapi isi dan cara perwujudannya bisa berbeda-beda dari Negara yang satu ke negara yang lain.¹ Secara etimologis, istilah “demokrasi” berarti pemerintah oleh rakyat” (*demos* berarti rakyat; *kratos* berarti pemerintahan). Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan di mana hak-hak untuk membuat keputusan-keputusan politik digunakan secara langsung oleh setiap warga negara, yang diaktualisasikan melalui prosedur pemerintahan mayoritas, yang biasa dikenal dengan sebutan demokrasi langsung. Sistem demokrasi ini terkenal pada zaman Yunani Kuno.

Dalam demokrasi langsung, semua warga negara, tanpa melalui pejabat yang dipilih atau diangkat dapat ikut dalam pembuatan keputusan negara. Sistem ini, jelas hanya cocok untuk relatif sejumlah kecil orang dalam organisasi kemasyarakatan atau dewan suku, misalnya, atau unit lokal

¹Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2013), hal 201.

serikat kerja, di mana para anggotanya dapat bertemu di satu ruangan untuk membahas berbagai masalah dan mengambil keputusan melalui musyawarah atau suara terbanyak. Selain itu, demokrasi pun dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan, biasanya suatu demokrasi perwakilan, di mana kekuatan-kekuatan mayoritas digunakan untuk menjamin terpenuhinya keuntungan atau kemakmuran bagi semua warga negara. Di sini jamin hak-hak individual atau kolektif, seperti kebebasan berbicara dan beragama. Ini yang disebut demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional.

Bangsa-bangsa modern-kontemporer, menggunakan istilah demokrasi dalam pengertian lebih luas dari pada pemerintahan oleh rakyat. Istilah demokrasi yang dikenal dewasa ini tidak saja mengacu pada system pemerintahan, tetapi juga system penataan kehidupan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, industri dan sebagainya.

b. Prinsip-prinsip Dasar Ajaran Demokrasi

Meskipun ini dan cara pelaksanaannya berbeda-beda, demokrasi memuat prinsip-prinsip dasar yang sama. Prinsip-prinsip tersebut adalah persamaan, hormat terhadap nilai-nilai luhur manusia, hormat terhadap hak-hak sipil dan kebebasan, serta *fair play*. Yang dimaksud dengan persamaan di sini adalah persamaan kesempatan bagi semua orang sebagai warga

Negara untuk mencapai pengembangan maksimum potensialitas-potensialitas fisik, intelektual moral, spiritual dan untuk mencapai tingkat partisipasi sosial oleh setiap pribadi yang konsisten dengan tingkat kematangan yang telah diperolehnya. Ini tidak berarti bahwa dalam suatu masyarakat demokratis semuanya sama. Demokrasi tidak mengabaikan kenyataan bahwa tidak sama kemampuan, kepentingan, serta ambisi antara orang yang satu dan orang yang lain. Namun yang diupayakan masyarakat demokratis ialah meminimalkan konsekuensi-konsekuensi perbedaan alamiah ini dengan menolong yang lemah agar menjadi lebih kuat. Tidak layak seseorang menyebut diri sebagai demokrat bila ia gagal mengupayakan terbukanya kesempatan bagi yang kecil dan lemah untuk menjadi yang lebih besar dan kuat.² Di dalam masyarakat demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Bagaimanapun kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual mengacu pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang sedang dilakukannya dalam hidup ini. Namun kebebasan itu tetap punya batas. Batasnya ialah bahwa kebebasan itu dilaksanakan demi pemenuhan hak dan kewajiban orang lain.

²Rafael RM, *Sosiologi Politik*, h 203.

Jadi kebebasan yang diizinkan disini bukanlah kebebasan yang mengarah ke anarkhi sosial. Anarkhi social akan terjadi jika setiap orang atau setiap kelompok dapat berbuat apa saja semau-maunya. Idealnya, batas kebebasan seharusnya berasal dari dalam diri manusia, dan bukan berasal dari luar dirinya. Artinya, perlu apa yang disebut *self discipline* (disiplin diri). Disiplin diri yakni suatu pengendalian diri yang muncul dari hati nurani, kesadaran serta tanggung jawab social individu, atau dari kesadaran dan rasa hormatnya kepada kebutuhan, hak-hak dan nilai-nilai luhur sesamanya.

Semua ini menunjukkan pentingnya suatu tingkat kemampuan tingkat intelektual, emosional, moral, dan kesadaran sosial yang tinggi di dalam diri mereka yang membangun dan memelihara masyarakat demokratis. Tidak adanya kematangan dalam hal-ha semacam ini, tidak adanya kebebasan berbicara, tidak adanya kebebasan pers, tidak adanya kebebasan beragama, berkumpul atau berserikat, serta tidak adanya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik, ekonomi, dan pendidikan akan menimbulkan anarki atau kekacauan sosial. Pendek kata, kebebasan menuntut adanya tanggung jawab dari orang-orang yang menggunakannya. Selain itu, sikap menjunjung tinggi *fair play* termasuk salah satu ciri hidup yang demokratis. Ini

mengandaikan adanya ketahanan diri terhadap diri terhadap godaan untuk mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain. Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan beberapa cirri hakiki demokrasi, demokrasi yang dapat diterima umum. Suatu pemerintahan disebut demokratis bila memenuhi delapan criteria berikut, 1) adanya persetujuan rakyat; 2) adanya partisipasi efektif rakyat dalam pembuatan keputusan politik yang menyangkut nasib mereka; 3) adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum; 4) adanya kebebasan individu untuk menentukan diri; 5) adanya penghormatan hak-hak asasi manusia; 6) adanya pembagian pendekatan yang adil; 7) adanya mekanisme kontrol sosial terhadap pemerintah; dan 8) adanya ketersediaan dan keterbukaan informasi.

B. Sistem Pergantian Kepala Negara dalam demokrasi

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.

1. Pengertian demokrasi

Secara etimologis, kata demokrasi (dari bahasa Yunani) merupakan bentukan dari dua kata *demos* (rakyat) dan *cratien* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan).³ Di kalangan pakar Islam demokrasi mempunyai kesamaan dengan *syura* yang berasal dari

³A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. h 81.

sya-wa-ra yang secara etimologis mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁴

Dalam pengertian yang lebih luas, Philipp C. Schmitter mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan dimintai tanggungjawab atas tindakan-tindakannya di wilayah publik oleh warga Negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil mereka yang telah terpilih. Hampir senada dengan pandangan ini adalah pengertian demokrasi yang di gambarkan oleh Henry B. Mayo, bahwa demokrasi adalah sistem politik yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip-prinsip politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dari beberapa pendapat ahli, tentang demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah, sebuah proses bernegara yang bertumpu pada peran utama rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan kata lain, pemerintah demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁵

Demokrasi sebagai dasar bernegara, memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. h 214.

⁵ A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. h 82.

masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁶

Demi terciptanya proses demokrasi, setelah terbentuk pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, Negara berkewajiban untuk saluran-saluran demokrasi. Perkembangan demokrasi tidaklah berhenti sebatas sebagai cara dan tujuan semata untuk mencapai kekuasaan publik, demokrasi harus bermuara pada menjadikannya sebagai acuan nilai dan etika publik. Pada tahapan inilah demokrasi dapat dikatakan telah mencapai tahap substansialnya, yakni pada saat nilai dan etika demokrasi tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan politik dan social masyarakat dan lembaga-lembaga demokrasi.⁷

Kendati dari berbagai pengertian itu terlihat bahwa rakyat diletakkan pada posisi sentral “rakyat berkuasa” tetapi dalam praktiknya oleh UNESCO disimpulkan bahwa ide demokrasi itu dianggap ambigu atau mempunyai arti ganda, sekurang-kurangnya ada *ambiguity* atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, dan praktek demokrasi.⁸ Demokrasi tidak datang secara tiba-tiba, ia merupakan proses panjang melalui pembiasaan, pembelajaran dan

⁶Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003),h 19.

⁷A.Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. h 83.

⁸Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, h 20.

pengalaman. Untuk tujuan ini lingkungan demokratis sangat dibutuhkan. Keberhasilan demokrasi oleh sejauh mana demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama antar warga Negara.⁹

Memang sejak dimunculkannya kembali asas demokrasi (setelah tenggelam beberapa abad dari permukaan Eropa) telah menimbulkan masalah tentang siapakah sebenarnya yang lebih berperan dalam menentukan jalannya Negara sebagai organisasi tertinggi. Pemakaian demokrasi sebagai prinsip hidup bernegara sebenarnya telah melahirkan fiksi yuridis bahwa Negara adalah milik masyarakat, tetapi dari fiksi-yuridis inilah justru telah terjadi tolak-tarik antara negara-masyarakat karena kemudia negara terlihat memiliki pertumbuhannya sendiri sehingga lahir konsep tentang negara organis.¹⁰

Dalam praktik pemerintahan, yang dibangun berdasarkan prinsip demokratis terdapat beberapa pilar demokrasi sebagai Indikator umum sebuah pemerintahan demokrasi konstitusional. Pakar politik J. Kristiadi menyebutkan sepuluh pilar demokrasi sebagai berikut: (1) kedaulatan rakyat; (2) pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah; (3) kekuasaan mayoritas (hasil pemilu); (4) jaminan hak-hak minoritas ; (5) jaminan hak-hak asasi manusia; (6) persamaan di depan hukum; (7) proses hukum yang berkeadilan; (8) pembatasan kekuasaan pemerintah

⁹A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. h 84.

¹⁰Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, h 20.

melalui konstitusi; (9) pluralism social; (10) dikembangkannya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Dalam pelaksanaan norma dan pilar demokrasi tersebut peran negara dan partisipasi masyarakat mutlak dibutuhkan. Sebagai Negara yang masih tergolong baru dalam pengalaman berdemokrasi, kesabaran semua pihak untuk melewati proses-proses demokrasi akan sangat menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan datang.¹¹

Ketika para ahli mendukung paham demokrasi, lain halnya dengan Mosca. Mosca juga adalah seorang yang tidak suka dengan demokrasi walau bukan seorang fasis. Dia tidak mempunyai pandangan sinis terhadap idealisme dan humanisme seperti Pareto, dan lebih menyukai pengaruh yang lebih kompleks dari kebiasaan-kebiasaan bertindak atas suatu perintah, agama dan patriotisme pada penggunaan kekerasan secara sewenang-wenang. Mosca menyukai pemerintahan yang konstitusional, yang menteri kabinetnya bertanggung jawab kepada kepala negara. Menurut dia ini adalah sistem yang paling baik di bumi karena membantu pertumbuhan kebebasan secara maksimal. Dia berpendapat bahwa semenjak demokrasi hanya mewaliki kepentingan dari kelompok mayoritas yang lemah, tampaknya berbahaya bagi kemerdekaan.¹²

¹¹ Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. h 86.

¹² Sp Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), h 208.

Generasi teoritisi elitisme politik berikutnya, mengalir melintasi samudra atlantik, mencoba membangun sebuah teori baru tentang demokrasi yang dapat diselaraskan kembali dengan teori elit politik. Mereka membangun suatu konsepsi, tentang demokrasi sebagai suatu system politik di mana partai-partai politik berlomba untuk mendapatkan suatu masa.¹³ Dalam suatu Negara demokrasi, yang diperintah selalu dapat bertindak untuk mengganti para pemimpin mereka atau untuk memaksanya mengambil keputusan-keputusan atas dasar kepentingan masyarakat banyak.

Peran agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat strategis bagi proses transformasi dan substansialisasi demokrasi di Indonesia. Keberhasilan Indonesia melaksanakan pemilihan umum dengan multi partai secara bebas dan aman menjadi pertanda keberhasilan peran agama dalam proses peralihan dan internalisasi demokrasi di Indonesia selanjutnya. Kesuksesan Indonesia dalam demokrasi ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari karakter ideologi negara Pancasila yang fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan *mainstream* politik global di mana demokrasi menjadi wacana dan prosedur utamanya.¹⁴

¹³ *Ibid.*, h 210.

¹⁴ A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*. h 157.

2. Sistem Pergantian Kepala Negara dalam Demokrasi

Dikebanyakan negara demokrasi, pemilu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Hasil pemilu, yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Dengan adanya pemilu diharapkan dapat menghasilkan wakil-wakil rakyat yang mampu mengerti mengenai aspirasi dari rakyat terutama dalam proses perumusan kebijakan publik dengan adanya sistem pergiliran kekuasaan. Peserta pemilu adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Partai politik sendiri berdasarkan undang-undang 2 tahun 2008 tentang partai politik. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintah yang didasarkan pada pemilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menentukan para wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislative, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum.¹⁵

Demokrasi telah menjadi arus utama negara-negara modern, para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti terumuskan di dalam Pancasila, (termasuk prinsip kerakyatan atau

¹⁵Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta:Konpress, 2013), h 3.

demokrasi) telah lama dipraktekkan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia.

Mattulada mengemukakan bahwa dalam kehidupan masyarakat Nusantara dikenal adanya kelompok-kelompok masyarakat yang disebut “kaum” atau anang (Bugis) atau marga (Batak) yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang keta. Secara perorangan warga kaum adalah mereka dan wajib menghormati.

Berkaitan dengan itu Mattulada menulis:

“Kalau demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan sesuatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana sebagian besar warganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan kaum ini, walaupun masih sederhana, cirri tersebut sudah ditemui.”¹⁶

Dengan demikian, ternyata pada masyarakat purba Nusantara sudah dikenal sistem berkelompok yang demokratis.

Dalam memilih suatu pemimpin atau wakil rakyat secara demokratis, Indonesia mengenal dua sistem pemilihan umum, yang pertama, sistem pemilihan mekanis menurut Wilhoff rakyat dipandang sebagai massa individu-individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua

¹⁶Mattulada, *Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia*, dalam majalah prisma, Februari 1977, dalam seri Prisma, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta:LP3ES, 1986), h 4.

sistem pemilihan umum yaitu sistem proporsional dan sistem distrik.¹⁷

Penganut sistem pemilihan mekanis ini antara lain liberalisme dan sosialisme. Penganut paham liberalisme, pemilu mengutamakan sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai kompleks hubungan-hubungan antar individu yang ber sifat kontraktual, sedangkan pada penganut paham sosialisme khusus komunisme lebih mengutamakan totalitas kolektif masyarakat dan mengecilkan peranan individu dalam totalitas kolektif itu.

Sistem pemilihan proporsional adalah suatu system di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilu) sesuai dengan imbalan perolehan suara yang didapat partai politik bersangkutan. Oleh karena itu, sistem pemilu ini, disebut juga dengan “sistem berimbang”.¹⁸ Sistem proporsional ini disebut juga “*Multi-member constituency*”.¹⁹ Sistem pemilihan proporsional ini terdapat segi positif dan negatifnya.²⁰ Segi positifnya, *pertama*, suara yang terbuang sangat sedikit, dan *kedua*, partai-partai politik kecil atau

¹⁷Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta:Kencana Media, 2017), h 46.

¹⁸Dahlan Thaib, dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta:Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992), h 22.

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), h 272.

²⁰ Bintang R, Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987), h 180.

partai gurem, kemungkinan besar dapat mendapat kursi di parlemen.

Sedang sisi negatif sstem proporsional ini adalah (1) sistem ini mempermudah fragmentasi parpol dan timbulnya parpol-parpol baru. Sistem ini cenderung lebih mempertajam perbedaan dibandingkan mencari mencari persamaan-persamaan. Akibat, partai politik peserta pemilu jumlahnya relative banyak, (2) anggota parlemen yang terpilih dalam pemilu cenderung lebih loyal terhadap partai politik yang mengusungnya, dibandingkan rakyat yang memilihnya, (3) jalannya pemerintahan cenderung sering tidak stabil, karena sering terjadi kegaduhan politik. Hal ini salah satu sebabnya, pembentukan kabinet didasarkan pada koalisi partai politik. (4) Terjadinya pencerminan yang salah tingkat pertama.

Adapun yang dimaksud dengan system distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih salah satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan masing-masing partai politik. Oleh karena itu, sistem ini juga disebut “*Single-member constituency*”. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut.

Sistem pemilihan distrik pun terdapat segi positif dan negatifnya.²¹ Segi positif pemilihan distrik adalah (1) hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, karena itu parpol tidak berani mencalonkan orang yang tidak populer dan juga berkualitas; (2) sistem ini mendorong bersatunya parpol atau terpaksa bergabung untuk mencalonkan seseorang yang lebih populer dan berkualitas, karena calon yang terpilih hanya satu; (3) sistem distrik ini akan dengan sendirinya menyederhanakan jumlah partai politik; (4) dengan sistem ini penyelenggara pemilu lebih sederhana dan tidak rumit. Sedangkan segi negatif dari distrik ini adalah (1) kemungkinan akan ada suara yang terbuang; (2) sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dari golongan minoritas. Karena itu, sulit bagi parpol kecil mendapat kursi di parlemen; (3) terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat kedua. *Kedua*, sistem pemilihan organisasi atau organisme, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup, bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup, seperti genealogi (rumah tangga), dan teritorial (desa, kota, daerah), fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan.²²

Masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang terdiri dari organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitas organisme, seperti komunitas atau persekutuan hidup.

²¹ *Ibid.*, h 75.

²² *Ibid.*, h 171.

Berdasarkan pandangan ini, maka persekutuan hidup inilah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak politik. Dengan kata lain, persekutuan itulah yang merupakan pengendali hal untuk mengutus wakil-wakil kepada lembaga-lembaga perwakilan masyarakat.

3. Tujuan Demokrasi

Dalam suatu kehidupan Negara yang demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Dengan ungkapan lain, demokrasi pada hakikatnya tidak hanya sebatas pelaksanaan prosedur-prosedur demokrasi seperti pemilu, suksesi kepemimpinan dan aturan lainnya, tetapi harus dilakukan secara santun dan beradab, yakni melalui proses demokrasi yang dilakukan tanpa paksaan, tekanan, dan ancaman dari dan oleh siapa pun.²³

Dalam perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayahnya dan jumlah warganya sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada Negara kota (*polis*) pada masa Yunani Kuno.²⁴ Hal ini melahirkan sistem demokrasi perwakilan yang bertujuan agar kepentingan dan kehendak warga negara tetap dapat menjadi bahwa pembuatan keputusan melalui orang-orang yang mewakili mereka. Di

²³A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan pencegahan korupsi*, h 85.

²⁴Lihat Mac Iver, *Negara Modern*, Judul Asli: *The Modern State*, Penerjemah. Drs Moertono, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h 313.

dalam gagasan demokrasi perwakilan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat, tetapi dijalankan oleh wakil-wakil rakyat tersebut benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat dan dipilih oleh rakyat, jadi harus ditentukan sendiri oleh rakyat. Dalam ungkapan lain demokrasi adalah bertujuan untuk sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga Negara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintah Negara tersebut.²⁵ Salah satu pilar demokrasi adalah *trias politica* yang membagi tiga kekuasaan politik Negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), untuk mewujudkan dalam tiga jenis lembaga Negara yang saling lepas (*independent*) dan dalam peringkat yang sejajar satu sama lain.²⁶

4. Pergantian Kepala Negara dalam Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme penyelenggaraannya melakukan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralism. Dalam pandangan Robert A. Dahl, terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi, yaitu (1) control atas keputusan pemerintah, (2) pemilihan umum yang jujur, (3) hak memilih, (4) hak dipilih, (5) kebebasan

²⁵Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, h 188.

²⁶*Ibid.*, h 189.

menyatakan pendapat tanpa ancaman, (6) kebebasan mengakses informasi, dan (7) kebebasan berserikat.²⁷

Namun demikian demokrasi tidak sekadar wacana yang mengandung prinsip-prinsip di atas, ia mempunyai parameter sebagai ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bias dikatakan demikian atau sebaliknya. Sedikitnya tiga aspek dapat dijadikan landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah :

- a. Pemilihan umum sebagai proses pembentukan pemerintah. Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam pergantian pemerintahan.
- b. Susunan kekuasaan Negara, yakni kekuasaan Negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu wilayah.
- c. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (*check and balance*) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif.

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, ada salah mekanisme dalam menentukan suatu pergantian kepala negara atau

²⁷A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, h 94.

pemerintahan yang disebut pemilu atau pemilihan umum di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di parlemen dan pemimpin nasional maupun daerah yang dilakukan secara langsung.²⁸ Berbeda dengan masa Orde Baru, pemilu 1999 yang dilakukan pasca-reformasi dikenal dengan euforia demokrasi. Sebagai masa transisi menuju demokrasi, pemilu 1999 diikuti oleh sebanyak 48 partai politik kontestan pemilu. Pada pemilu ini, meski diikuti 48 partai politik, mekanisme pemilihan Presiden dan wakil presiden masih dilakukan melalui mekanisme perwakilan melalui sidang di Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung pada tahun 2004 telah menjadi tonggak baru bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakilnya (pilkada) secara langsung di tingkat provinsi atau kabupaten kota. Unsur terpenting dalam demokrasi adalah partai politik. Partai politik mempunyai peran penting dan sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan anggotanya yang bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah wadah bagi demokrasi penampung aspirasi. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada setiap negara :

²⁸ *Ibid.*, h 96.

1). Sistem satu partai

Sistem ini sama seperti tidak ada partai politik, karena hanya ada satu partai untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dalam sistem ini, aspirasi rakyat kurang berkembang, segala ditentukan oleh satu partai tanpa adanya partai lain, baik sebagai saingan maupun sebagai mitra. Partai tunggal tersebut adalah partai yang mengendalikan pemerintahan (*the ruling party*), seperti partai komunis di Cina, Uni Soviet, dan Vietnam, dan Partai fasis di Italia.

2). Sistem dwipartai

Sistem ini terdiri dari dua partai sebagai wadah penyalur aspirasi rakyat. Seperti di Amerika Serikat, ada partai Republik dan Partai Demokrat. Ada kalanya sistem kepartaian di Inggris dan Australia digolongkan sebagai sebagai system dwipartai, walaupun sebenarnya terhadap lebih dari dua partai. Partai-partai lainnya bias ikut dalam struktur pemerintahan jika berkoalisi dengan partai besar, yaitu salah satu dari dua partai yang berpengaruh dan banyak pendukungnya.²⁹

3). Sistem Multi Partai

Sistem ini terdiri lebih dari dua partai. Negara yang menganut sistem multi partai antara lain, Jerman, Perancis, Malaysia, dan Indonesia. Dalam sistem multipartai, jika tidak ada partai yang

²⁹A. Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, h 99.

meraih suara mayoritas, maka dibentuk pemerintahan koalisi yang terdiri dari banyak partai politik.³⁰

Dari pernyataan di atas yang cocok diterapkan dalam sistem demokrasi menurut penulis adalah sistem multi partai, di mana sistem ini merupakan yang diterapkan oleh Negara Indonesia. Yang memiliki sejarah demokrasi yang sangat panjang.

Pengangkatan presiden Republik Indonesia pada era kemerdekaan awal secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Presiden ialah orang Indonesia asli.
- b) Presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.³¹ Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa untuk pertama kali secara konstitusional mekanisme pengangkatan kepala Negara dilakukan secara demokrasi, yakni melalui perwakilan. Dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia baik secara yuridis ataupun politis telah mendelegasikan hak konstitusionalnya kepada para wakil rakyat yang ada di lembaga permusyawaratan rakyat.³² Sehubungan lembaga tersebut lembaga tersebut secara organik belum eksis dikarenakan berbagai kondisi, maka presiden dan wakil presiden Indonesia dipilih

³⁰ *Ibid.*

³¹ Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h 195.

³² Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, h 239.

dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).³³

Telaah yuridis, (HTN) menunjukkan bahwa dalam setiap era, mulai dari era orde lama (demokrasi terpimpin) hingga era orde baru (demokrasi Pancasila) dan era Reformasi (demokrasi liberal), implementasi dasar hukum ketatanegaraan menunjukkan adanya sikap inkonsisten dari para pejabat dan politisi Republik Indonesia. Berkaitan dengan pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pasca kemerdekaan RI telah diatur dalam pasal 6, ayat 2 UUD 1945, yakni presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR.³⁴ Artinya, keduanya jika dilihat dari segi pengangkatan dan pemberhentian, mempunyai kedudukan yang sederajat (equal). Artinya, presiden dan wakil presiden dari aspek suksesi pengangkatan menjadi pasangan yang setara. Mekanisme pengangkatan presiden dan wakil presiden yang ditetapkan satu paket tersebut mengilustrasikan bahwa apabila terjadi pertentangan antara presiden dan wapres, presiden tidak bisa memecat wakil presiden.

Demokrasi menurut Islam, berdasarkan *syura* (musyawarah). Secara spesifik demokrasi di Indonesia adalah, dalam ketatanegaraan Islam dikenal dengan istilah “ahli syura”. Posisinya yang sangat penting, membuat keberadaannya tidak mungkin dipisahkan dengan

³³Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi, Cet ke-8 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h 272.

³⁴Sutisna, *Pemilihan..* h 240.

struktur ketatanegaraan. Karenanya, bagaimanapun bagusya seorang pemimpin, ia tetap tidak akan pernah lepas dari kelemahan, kelalaian, atau ketidaktahuan dalam beberapa hal. Sehingga Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk melakukan syura.

Kata asy-syura adalah ungkapan lain dari kata musyawarah atau masyurah yang dalam bahasa kita juga dikenali dengan musyawarah, sehingga ahli syura adalah orang-orang yang dipercayai untuk diajak bermusyawarah.

B. Demokrasi di Indonesia

Semenjak kemerdekaan 17 Agustus 1945, Undang-undang Dasar 1945 memberikan penggambaran bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Dalam mekanisme kepemimpinan presiden harus bertanggung jawab kepada MPR dimana MPR adalah badan yang dipilih dari rakyat. Sehingga secara hirarki seharusnya rakyat adalah pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Indonesia sempat mengalami demokrasi singkat pada tahun 1956 ketika untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilu bebas di Indonesia, sampai kemudian presiden Soekarno menyatakan demokrasi terpimpin sebagai pilihan system pemerintahan. Setelah mengalami demokrasi pancasila.³⁵ Sebuah demokrasi semu yang diciptakan untuk melanggengkan kekuasaan Soekarno, Indonesia kembali

³⁵ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h 196.

masuk ke dalam alam demokrasi pada tahun 1998 ketika pemerintahan junta militer Soeharto tumbang. Pemilu demokratis kedua bagi Indonesia terselenggara pada tahun 1999 yang menempatkan Demokrasi Indonesia-Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Tumbangnya Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998, adalah momentum pergantian kekuasaan yang sangat revolusioner dan bersejarah di negara ini. Dan pada tanggal 5 Juli 2004, terjadilah sebuah pergantian kekuasaan lewat pemilu Presiden putaran pertama. Pemilu ini mewarnai sejarah baru Indonesia, karena untuk pertama kali masyarakat memilih langsung presidennya. Setelah tumbangnya Orde Baru tibalah detik-detik terbukannya pintu reformasi yang telah begitu lama dan dinanti. Secercah harapan berbaur kecemasan mengawali dibukanya jendela demokrasi yang selama dasawarsa telah ditutup oleh pengapnya otoritarianisme Orde Baru.³⁶ Momentum ini menjadi penanda akan dimulainya transisi demokrasi yang diharapkan mampu menata kembali indahny taman Indonesia. Pada hari-hari selanjutnya, kata “reformasi” meskipun tanpa ada kesepakatan tertulis menjadi jargon utama yang menjiwai ruh para pejuang pro-demokrasi. Selang tiga tahun pasca turunnya soeharto dari tahun 1998 sampai 2000, telah terjadi tiga pergantian presiden yang memunculkan nama-nama yaitu, Habibie, Gus Dur dan Megawati sebagai

³⁶ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara*, h 198.

presiden republik Indonesia. Dan duduknya ketiga presiden baru tersebut. Juga diwarnai dengan perjuangan yang sengit dan tak kalah revolusioner. Dan lagi-lagi untuk kesekian kalinya mahasiswa menjadi barisan terdepan yang mendobrak perubahan tersebut.

Dalam mengenai pemilihan kepala negara dan wakilnya, Indonesia mempunyai landasan teori untuk pelaksanaannya, landasan yang menjadi dasar bagi mekanisme pemilihan kepala negara antara lain: landasan filosofis, landasan politis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Selain menjadi pedoman dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala negara dan wakilnya, sehingga diharapkan dengan landasan yang kokoh maka akan terwujud satu kepemimpinan yang bisa mengayomi seluruh warga negara.

1. Landasan Filosofis

Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Ia merupakan perwujudan dan keinginan rakyatnya. Oleh karena itu, setiap negara mempunyai falsafah berbeda. Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat dan bangsanya, tidak mungkin untuk mengambil falsafah negara lain untuk dijadikan sebagai falsafah bangsanya begitu saja. Segala aspek kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan falsafahnya.³⁷ Pada waktu Badan Penyidik Usaha-Usaha

³⁷ Sukarna, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h 1-3.

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam rapat mencari *philosofische grondslag*³⁸ untuk Indonesia yang akan merdeka, Pancasila diputuskan sebagai dasar Negara. Hal itu berarti bahwa setiap tindakan rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara. Dalam penjelasan UUD 1945, dapat diketahui bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran merupakan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang mendasari hukum dasar negara (*Groundnorm*),³⁹ baik yang tertulis maupun yang tidak. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut: pokok pikiran pertama negara: “negara” berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Hal ini yang menjadi basis filosofis aktivitas aparatur negara. Rumusan ini menunjukkan pokok-pokok pikiran persatuan. Singkatnya, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan.

³⁸R.M.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2004), h 123-127.

³⁹Usep Ranuwijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia, Dasar-Dasarnya*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), h 175.

Pokok pikiran kedua: “negara hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ketiga ini menunjukkan bahwa di negara Indonesia yang berdaulat adalah rakyat Indonesia sehingga kedaulatan ada ditangan rakyat.

2. **Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan instrument legalitas dalam setiap prosedur pemilihan kepala negara atau pemimpin sebuah demokrasi. Demikian pula halnya dengan organisasi nasional berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam teori Hukum Tata Negara yang melandaskan pada prinsip negara hukum (*rechstaat*) seperti Indonesia, studi tentang pengangkatan kepala negara melalui pendekatan yuridis menjadi sebuah keharusan.⁴⁰

Perlu diperhatikan bahwa salah satu asas penting dari negara hukum adalah asas legalitas yang menekankan bahwa substansi dari asas legalitas adalah bahwa setiap aktivitas pejabat

⁴⁰ Abraham Amos, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2007), h 12-17.

atau badan administrasi negara harus berdasarkan undang-undang.⁴¹ Hal itu mempunyai arti bahwa apabila sebuah aktivitas dilakukan oleh pejabat negara yang tidak didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan dapat dianggap inkonstitusional atau melanggar hukum. Terlebih dalam proses pengangkatan kepala negara sebagai pejabat public tingkat nasional haruslah memenuhi rumusan teori negara hukum sebagaimana telah disepakati secara nasional dan menjadi instrument ketatanegaraan.

Pendekatan yuridis yang penulis kemukakan di sini adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain;

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pascarevolusi hingga Pascareformasi.⁴²
2. Undang-Undang tentang pemilu, dan⁴³
3. Undang-Undang lain yang berkaitan dengan proses pengangkatan kepala negara.⁴⁴

3. Landasan Politis

Landasan politis merupakan salah satu tahapan mempelajari teori pengangkatan kepemimpinan nasional. Hal ini dianggap penting karena secara implisit dalam setiap prosesi

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...*, h 78.

⁴² UUD 1945, setelah amandemen, I,II,III, dan ke-IV.

⁴³ UUD No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum. Lihat UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

⁴⁴ UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

pemilihan syarat dengan interes politis, baik secara individual, komunal atau nasional. Terlebih dalam konteks kepemimpinan nasional pasca revolusi kemerdekaan dan selanjutnya. Bahkan dapat dikatakan sebuah keniscayaan yang tidak diabaikan oleh anak bangsa. Kepemimpinan awal dari satu kelompok sosial atau negara akan menjadi proto-type bagi kepemimpinan selanjutnya, baik dalam konteks proses pemilihan pemimpin, model kepemimpinan, atau karakteristiknya.⁴⁵ Sebuah proses pemilihan kepemimpinan secara relevan dengan teori dan prosedur kepemimpinan akan menghasilkan pemimpin yang mempunyai karakteristik dan model kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat, demikian sebaliknya. Selain itu, melalui landasan politis juga akan diketahui bagaimana implikasi kebijakan pemimpin dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tegasnya, pendekatan politis ini tidak hanya terfokus pada aspek kekuasaan semata. Akan tetapi lebih terfokus pada aspek implementasi kebijakan seorang pemimpin dalam mengartikulasikan setiap amat yang menjadi tanggungan kepemimpinan.

4. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pendekatan kemasyarakatan. Melalui pendekatan ini dapat diketahui tingkat legitimasi

⁴⁵Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), 33-39.

masyarakat yang terhadap pemimpin dan kepemimpinan seseorang. Berkaitan dengan pendekatan sosiologis, Max Weber mengatakan bahwa secara teoritis terdapat dua model utama dalam teori kepemimpinan, yakni teori kepemimpinan tradisional dan teori kepemimpinan kharismatik. Teori kepemimpinan kharismatik menunjukkan bahwa ia mendapat kepercayaan dari pengikutnya.⁴⁶ Teori tersebut menunjukkan bahwa ia telah mendapatkan legitimasi dari pengikutnya atau rakyatnya.

Melalui pendekatan sosiologis ini akan diketahui sejauh mana pula efektivitas dan efisiensi kepemimpinannya, terutama dalam mengelola (memanage) kepentingan publik.

Berdasarkan pemaparan tersebut bahwa dapat disimpulkan bahwa landasan yang menjadi dasar bagi pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia adalah landasan filosofis berupa Pancasila, landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan, landasan politis berupa sistem politik yang ada di Indonesia dan landasan sosiologis yaitu kondisi sosial masyarakat Indonesia.⁴⁷ Adapun secara ringkas landasan tersebut adalah:

- a. Landasan Ideal**, yaitu Pancasila terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan/perwakilan.

⁴⁶ Harbani Pasolong, *Kepemimpinan Birokrasi*, (Bandung : Alfabeta, 2008), h 117.

⁴⁷ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara*, h 212.

- b. Landasan Konstitusional**, yaitu UUD 1945 yang termuat di dalam : a. pembukaan alenia ke empat, b. batang tubuh pasal 1 dan 2, c. penjelasan umum tentang sistem pemerintahan negara.
- c. Landasan Operasional**, yaitu undang-undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan undang-undang lainnya.

Setelah mengetahui landasan pemilihan kepala negara dan wakil di Indonesia, selanjutnya asas dari pemilu yang dilaksanakan di Indonesia adalah “**luber**” yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Asal *luber* sudah ada jaman Orde Baru dan hingga kini masih dipertahankan. Kalimat “**langsung**” berarti pemilih diharuskan memberikan suara secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. “**Umum**” berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. “**Bebas**” berarti pemilih diharuskan memberikan suara tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kemudian “**Rahasia**” berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.

Di era reformasi kemudian berkembang pula asas “**Jurdil**” yang merupakan singkatan dari “**Judur dan Adil**”. Asas jujur mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara

yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan dipilih. Asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.

Peraturan pemilihan umum pada masa reformasi undang-undangnya yaitu: sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakilnya, kemudian undang-undang tersebut disempurnakan oleh UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakilnya. Reformasi membawa beberapa fundamental. Pertama, dibuka kesempatan kembali untuk bergerakinya partai politik secara bebas, termasuk mendirikan partai baru.⁴⁸ Ketentuan ini kemudian tercermin dalam pemilihan umum 1999 dan diselenggarakan dengan disertai banyak partai. Kedua, pada pemilihan umum 2004 untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia diadakan pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung, sebelumnya presiden dan wakil dipilih melalui MPR. Ketiga, diadakan pemilihan untuk suatu badan baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan daerah secara khusus. Keempat, diadakan "*electoral threshold*", yaitu ketentuan bahwa untuk pemilihan legislative pusat. Untuk

⁴⁸Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara, ...* h 220.

pemilihan presiden dan wakil presiden, partai politik harus memperoleh minimal 3 % jumlah kursi dalam badan yang bersangkutan atau 5 % dari perolehan suara sah secara nasional.⁴⁹

C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Negara Atau Presiden di Indonesia

1. Syarat-Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UU No. 42 Tahun 2008 Pasal 5 disebutkan syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakilnya di Indonesia :

- 1) Bertaqwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak diri sendiri.
- 3) Tidak pernah mengkhianati Negara.
- 4) Mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- 5) Bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.
- 7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

⁴⁹ *Ibid.*, h 224.

- 8) Tidak sedang menyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- 9) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- 10) Terdaftar sebagai pemilih;
- 11) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 12) Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 13) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 14) Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 15) Berusia sekurang-kurang 35(tiga puluh lima) tahun lebih.
- 16) Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

- 17) Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau orang yang bukan terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
- 18) Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Syarat-syarat Calon Pemilih

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin.

- 1) Masukkan calon pemilih
- 2) Warga negara Indonesia
- 3) Yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin
- 4) Terdaftar sebagai pemilih di daerahnya
- 5) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- 6) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap
- 7) Hasil pemilih yang telah memenuhi syarat

Berdasarkan persyaratan tersebut maka setiap warga Indonesia yang telah memenuhi syarat memilih hak untuk aktif dalam pemilihan umum presiden dan wakilnya.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid.*, h 227-229.

3. Peran Partai Politik dalam Pemilihan Umum Presiden

peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi system perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik. Maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai partai politik.

Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan. Seperti diketahui hanya partai politik yang berhak mengajukan calon dalam pemilihan umum. Makna dari semua ini adalah, bahwa proses politik dalam pemilihan umum (pemilu), jangan sampai mengebiri atau bahkan menghilangkan peran dan eksistensi partai politik. Semua yang terjadi sekarang adalah bagian dari proses demokrasi. Partai dalam arti modern sebagai

suatu organisasi massa yang berusaha untuk mempengaruhi proses politik, merombak kebijaksanaan dan mendidik para pemimpin dan mengejar penambahan anggota.

Pemilihan umum tahun 2004 digelar dengan bersandar kepada UU No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Dalam perjalannya, undang-undang ini dianggap belum mampu sistem kepartaian dan demokrasi dan perwakilan yang efektif dan fungsional. Untuk menciptakan partai politik yang efektif dan fungsional diperlukan ada kepercayaan penuh dari rakyat. Untuk menciptakan sistem politik yang memungkinkan kepercayaan rakyat diperlukan sebuah peraturan perundang-undang yang mampu menjadi landasan tumbuhnya partai politik yang efektif dan fungsional. Dengan kata lain, diperlukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem politik Indonesia.

E. Mekanisme Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Pada tahap awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berlandaskan pada teori *daruriyyat*, para elit politik (muslim) bersepakat untuk mengangkat Soekarno-Hatta menjadi kepala negara dan wakil negara. Ditinjau dari teori politik kenegaraan, model pengangkatan kepala negara dan wakil identik dengan teori aklamasi. Hal ini terjadi karena secara yuridis, pada waktu itu belum ada konstitusi yang menjadi payung hukum sebagai

instrument-regulatif. Perkembangan selanjutnya, konsep pengangkatan kepala negara diatur sedemikian rupa melalui UUD 1945⁵¹ yang menjadi dasar konsitusional ketatanegaraan Indonesia.

Teori konstitusi Indonesia, menurut catatan sejarah, setidaknya tercatat tiga kali perubahan dasar konsitusi NKRI ditambah dengan empat kali amandemen UUD 1945 pascareformasi.⁵² Secara historis, ternyata perubahan dasar konstitusi tersebut seiring dengan dinamika politik yang mengiringinya.⁵³ Pada orde lama (1945-1965), konsep pengangkatan Negara secara normatif sebagai tertuang dalam UUD 1945, dinyatakan bahwa kepala negara diangkat oleh MPR. Cara pengangkatan kepala negara di Indonesia baik sebagai perdana menteri, maupun sebagai presiden dilakukan dalam bentuk pemilihan melalui perwakilan (DPR), dan dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Dan menjadi jembatan atau kendaraan politiknya melalui partai adapun mekanisme dan praktek pelaksanaannya seperti sebagai berikut:

a. Pengangkatan Kepala Negara di Era Demokrasi Liberal 1945-1949

Pasca ditetapkannya konstitusi pertama negara Republik pada tanggal 18 Agustus 1945, yakni sehari setelah dinyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara yuridis konsitusional

⁵¹Lihat UUD No. 42 Tahun 2008 tentang *Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*, Bab II Pasal 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h 6.

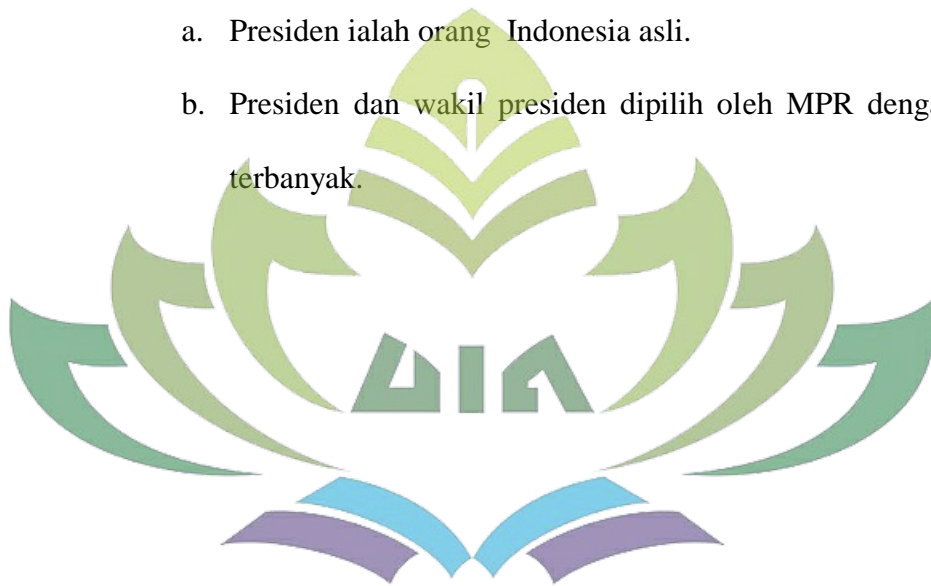
⁵²Moh, Mahfud MD, *Kekuasaan Politik dalam Konsitusi Indonesia*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2000), h 98.

⁵³Eef S. Fatah, *Penghianatan Demokrasi Ala Orde Baru*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h 9.

Undang-Undang Dasar tersebut dikenal sebagai dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Konsitusi dapat dikatakan sebagai *“revolusi grondwe’t”*.⁵⁴

Pengangkatan presiden Republik Indonesia pada era kemerdekaan awal secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal enam dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Presiden ialah orang Indonesia asli.
- b. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak.



⁵⁴ Ismail Suny, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, (Jakarta: Aksara, 1983), h 13.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di atas menunjukkan bahwa untuk pertama kali secara konstitusional mekanisme pengangkatan kepala Negara dilakukan secara demokrasi, yakni melalui perwakilan.

b. Pemilihan Presiden dalam Konstitusi RIS 1949-1950

Pemilihan presiden dan wakil presiden yang didasarkan pada konsitusi RIS 1949, berbeda dengan ketentuan konstitusi pada konstitusi yang tertuang dalam pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada konstitusi RIS ditentukan, yakni didasarkan pada norma konstitusi yang sesuai dengan pasal 69 ayat 2 yakni:

1) Presiden adalah kepala negara

Beliau dipilih oleh orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian tersebut dalam pasal 2.

2) Presiden harus orang Indonesia yang telah berusia 30 tahun. Beliau tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta atau menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

3) Dinyatakan bahwa presiden sebagai kepala negara dipilih oleh lembaga perwakilan dari beberapa daerah (bagian federal), dan selanjutnya baru dinyatakan bahwa ia harus berusia 30 tahun.

c. Pemilihan Presiden dalam UUDS 1950-1959

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara ini, mekanisme pengangkatan kepala negara di Indonesia terus berubah seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika politik nasional tersebut yang terus

berkembang. Pemilihan presiden dan wakil presiden pasca dicabut dan digantinya UUD RIS didasarkan pada UUDS 1950. Ketentuan yang termuat dalam UUDS 1950 dinyatakan sebagai berikut : Pasal 44.

Alat-alat perlengkapan negara;

- a) Presiden dan wakil presiden.
- b) Menteri-menteri.
- c) Dewan perwakilan rakyat.
- d) Mahkamah Agung.
- e) Dewan Pengawas Keuangan.

Ketentuan tersebut telah menetapkan komposisi perlengkapan Negara secara komprehensif. Mulai dari presiden dan wakil presiden hingga para pembantu presiden yang secara yuridis merupakan organ-organ yang adanya dalam konteks Negara hukum yang demokratis. Landasan konstitusional tersebut dipertegas melalui pasal 45 sebagai berikut :

- 1) Presiden adalah kepala negara
- 2) Dalam melakukan kewajibannya.
- 3) Presiden dan wakil presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 4) Untuk pertama kali wakil presiden diangkat oleh presiden dari anjuran yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

- 5) Presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia yang telah berusia 30 tahun dan tidak boleh orang yang tidak diperkenankan serta suatu dalam menjalankan hak pilih ataupun orang yang telah dicabut haknya untuk dipilih.

Presiden maupun wakil presiden akan dipilih menurut aturan pasal 45 ayat 1,2, dan 3. Akan tetapi dalam kenyataannya undang-undang tentang pemilihan presiden dan wakil presiden belum pernah ada. Presiden Soekarno tidak dipilih, tetapi ditetapkan sebagai presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam piagam persetujuan antara pemerintah Republik Serikat dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 April 1950.

Seperti halnya dalam Undang-Undang Dasar (RIS) 1949, dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pun tidak disebut berapa lama pengangkatan seorang presiden dan wakil presiden tidak akan diganti sebelum Undang-Undang Dasar tetap dibentuk oleh Konsituante.

d. Pemilihan Presiden dalam UUD 1945 Pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Pada fase ini, sistem ketatanegaraan Indonesia, menentukan sistem politik yang cukup fenomenal, yakni sistem demokrasi terpimpin. Diberlakukannya Undang-Undang 1945 yang salah satu alasan pentingnya teks-teks yang terkandung dalam UUD 1945, relatif memberikan kesempatan terlahirnya demokrasi terpimpin dan telah menciptakan suasana politik serba terkontrol oleh negara.

Pemilihan umum yang tadinya ditujukan untuk memilih lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota. Setelah amandemen ke empat UUD 1945 tahun 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden, yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukan dalam masa pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Di tengah masyarakat istilah “pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan presiden yang diadakan setiap 5 tahun sekali.

e. Pemilu Tahun 1955

Pemilu tahun 1955 adalah, tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritas kepada pejabat negara dan tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Sangat disayangkan, kisah sukses pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan pemilu kedua, lima tahun berikutnya, meskipun tahun 1958 pejabat presiden Soekarno sudah melantik panitia Pemilihan Indonesia II.⁵⁵ Berubahnya format politik dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sebuah keputusan presiden untuk membubarkan badan

⁵⁵ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara.....*, h 252-259.

konstituante dan pernyataan kembali UUD 1945 yang diperkuat angan-angan Presiden Soekarno menguburkan partai-partai. Dekrit itu kemudian mengakhiri masa demokrasi dan mengawali otoritarianisme kekuasaan di Indonesia, meminjam istilah Ismail Sunny – sebagai kekuasaan Negara bukan lagi mengacu pada *democracy by law*, tetapi *democracy by decree*.

f. Pemilihan Presiden pada Era Orde Baru 1966-1997

Proses pelaksanaan pemilu era orde baru layak untuk dicermati, terlepas dari mekanisme penyelenggaraan pemilu yang tanpa syarat dengan manipulasi konstitusi. Pelaksanaan pemilihan presiden selaku kepala negara pada orde baru dapat dinyatakan sebagai pemilih demokrasi representative, yakni melakukan perwakilan anggota DPR dan MPR. Hal tersebut dipastikan karena semasa demokrasi Pancasila dan orde baru, instrument konstitusi yang dijadikan landasan hukum penyelenggaraan pemilu adalah UUD 1945 pasca Dekrit Presiden. 5 Juli 1959 yang telah menempatkan DPR sebagai wakil rakyat yang representative dan konstitusional.⁵⁶ Sistem ketatanegaraan Indonesia menemukan wajah barunya ketika Era Reformasi bergulir, dengan terselenggaranya pemilu 1999 secara demokratis, terlepas dari kekurangan dan kelemahan pada beberapa aspek. Pemilu kali ini, pada tahap pemilihan presiden, masih diperlakukan sistem perwakilan rakyat di keanggotaan MPR RI. Partai politik mempunyai kekuasaan

⁵⁶ Anwar Haryono, *Perjalanan Politik Bangsa*, (Jakarta: GIP, 1997), h 122.

dan keleluasaan untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada sidang umum MPR RI dengan sistem dan mekanisme rekrutmen yang diserahkan sepenuhnya pada masing-masing partai politik peserta pemilu.

g. Pengangkatan Presiden dalam UUD 1945 Hasil Amandemen

Sampai saat ini telah dilakukan empat tahap amandemen yakni, amandemen pertama disahkan pada 19 Oktober 1999; amandemen kedua disahkan 18 Agustus 2000; amandemen ketiga disahkan 10 November 2000; dan amandemen keempat disahkan 10 Agustus 2004. UUD 1945 hasil amandemen, pemilihan presiden dan wakil presiden tidak lagi menggunakan sistem perwakilan, namun diberlakukannya sistem langsung. Artinya, semua partai pemilu memiliki kesempatan sama untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dengan tetap berpija pada undang-undang pemilihan presiden yang berlaku, yakni UU No. 42 Tahun 2008. Pada mekanisme pemilihan presiden dipilih secara langsung dan berpasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilu.⁵⁷

Dengan demikian dengan terciptanya proses demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokrasi. Selain saluran formal lewat DPR dan partai politik,

⁵⁷ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara...*, h 285.

pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi non formal seperti kebebasan pers.⁵⁸



⁵⁸A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), h 83.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ubaedillah, *Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2015).
- Abdullah al-Amin, *Dirasat fi al-firaq wa al-Madzahih al-Qadimah al-Ma'asarih*, (Beirut : Dar al-Haqiqiyah, tt.).
- Abid al-Jabiri, *Formasi Nalar Arab*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta:IRCIsoD, 2003).
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa al-Tirmidzi, Jami' Tirmidzi, *Kutubun al-Sittah, 2641* (April 2000/Muharrom, 1421).
- Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *fath al-Bari VIII* (Ttemp:Maktabah Salafiyah, tt).
- Ahmad Nahrwari Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i* (Jakarta: Hikmah, 2008).
- Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syi'ah Studi zperbandingan Akidah dan Tafsir jil 1*(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syi'ah Studi zperbandingan Akidah dan Tafsir jil 1* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedi Sunnah dan Syi'ah Studi zperbandingan Akidah dan Tafsir jil 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).
- Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal Juz I* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1993).
- Ary Ginanjar, *Emosional Spritual Quotient* (Jakarta: Arga, 2001).
- Bachtiar, Boy Rafly Amar, Veithzal Rivai. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada, 2013).
- Bintan R, Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1987).
- Dahlan Thaib, dan Ni'matul Huda, *Pemilu dan Lembaga Perwakilan dalam Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta:Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992).
- Fadli SJ. Abdul Halim, *Politik Islam Syiah dari Imamah Hingga Wilayah Faqih* (Malang : UIN Maliki Press, 2012).

Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (New York: Spoken Language Service, 1976).

<https://www.kompasiana.com/lismanto/55124565a33311e656ba8156/pemikiran-politik-sunni-syiah-khawarij-dan-mu-tazilah>. di unduh 10:52 WIB, 18 Februari 2020.

Ibnu Khaldun, *Makadimmah Ibnu Khaldun*, (Jakarta Pustaka Al-Kausar, 2010), Penerjemah tim Pustaka Al-Kausar.

Jurnal Al-Afkar *Kepemimpinan dalam Perspektif Islam dan Dasar Konseptualnya*. Vol. V, No. 1, April 2017.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Yayasan Penyelenggara atau Penafsir Al-Qur'an: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).

Khairuddin, M. Iwan Satriawan. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Uud Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018).

Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1967).

Mac Iver, *Negara Modern*, Judul Asli: *The Modern State*, Penerjemah. Drs Moertono, (Jakarta: Bina Aksara, 1988).

Mattulada, *Demokrasi dalam Tradisi Masyarakat Indonesia*, dalam majalah prisma, Februari 1977, dalam seri Prisma, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986).

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rir Cipta, 2003).

Muhammad Bagir Al-Shadr, et al. *Khilafah dan Imamah Penjelasan Lengkap Atas Ide Kepemimpinan Islam*, terjemahan R. Hikmat Danaatmaja (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012).

Muhammad bin Yazid Abu abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibn Majah* (Saudi Arabia : Bayt al- Afkar al-Dawlawiyyah, tth).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group.2016).

- Nasihun Amin, *Paradigma Teologi Politik Sunni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi, Cet ke-8 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013).
- Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta:Kencana Media, 2017).
- Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah Wal jama'ah* (Yogyaakarta: Pustaka Pelajar, 2014).
- Petra Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. (Jakarta: Modern English Press,1999).
- Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2013).
- Ranny Kautun, *Metode Penelitian untuk penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika,2000).
- S.H.M, Jafri, *Awal dan Perkembangan Islam Syi'ah, dari Saqifah Sampai Imamah*, (Jakarta:Pustaka Hidayah, 1989).
- Sahilun A, Nasir, *Pemikiran Kalam Teologi Islam* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2010).
- Salamah Noorhidayati, "Hadis Ghadir Khum dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah", *Laporan Penelitian IAIN Tulungagung*, 2014.
- Saldi Isra, *Demokrasi Konstitusional* (Jakarta:Konpress, 2013).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (J Rajawali Pers, 1985).
- Sp Varma, *Teori Politik Modern* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010).
- Sri Rahayu Wilujeng, HUMANIKA Vol. 19 No. 1. *Meningkatkan Kehidupan Berbangsa Melalui Budaya Demokrasi*.
- Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2013).

Tabroni, *Spritual Leadership : Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-Prinsip Spritual Etis* (Malang: UMM Press, 2005).

Zainal Abidin, *Imamah dan Implikasi dalam Kehidupan Sosial: Telaah atas Pemikiran Teologi Syiah* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2012).

